

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 25 September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dalam agenda ini memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang didasari oleh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). MDGs merupakan agenda yang telah diupayakan dari tahun 2000 hingga 2015. Melalui MDGs, akan menjadi pemandu dalam mencapai tujuan global yaitu pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Berikut adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 milik PBB meliputi: (1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi dan infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) Penanganan erubahan iklim; (14) Ekosistem laut; (15) Ekosistem daratan; (16) Perdagangan, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan¹.

¹ UCLG, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang erlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah*. Diakses dari <<https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>> pada tanggal 10 Februari 2020.

Dalam upaya mewujudkan SDGs, aktor-aktor *sub-state* di seluruh dunia tidak dapat dikesampingkan. Proses urbanisasi yang berkembang pesat di banyak kota di seluruh dunia telah menyebabkan munculnya banyak problematika. Tujuan 11 dalam SDGs yang berbunyi “kota dan pemukiman yang berkelanjutan” dapat diartikan sebagai langkah besar untuk mendapat pengakuan terhadap kekuatan transformatif urbanisasi dalam pembangunan, dan adanya peran para pemimpin daerah guna mendorong perubahan global secara *bottom-up*².

Dalam melihat pentingnya peran *sub-state* dalam mencapai kesejahteraan terlihat dari salah satu provinsi di Korea Selatan yaitu Provinsi Gyeongsangbuk-Do. Provinsi ini merupakan sebuah wilayah yang sangat kaya dan dengan industri yang maju. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 1988, Provinsi Gyensangbuk-Do mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Gyeongsangbuk-Do aktif dalam kegiatan diplomatiknya baik itu dengan menjalin *sister city* dengan provinsi lain di dunia hingga bergabung dalam organisasi pemerintahan regional *North East Asia Regional Governments Association* (NEAR) sejak September 1996. Organisasi ini beranggotakan provinsi-provinsi dari 6 negara yaitu China, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Mongolia, dan Rusia. Organisasi tersebut berkomitmen untuk berkontribusi pada pengembangan kawasan dan perdamaian dunia. Jadi, terlihat jelas bagaimana peranan *sub-state* saat ini tidak bisa dikesampingkan. Provinsi Gyensangbuk-Do berhasil menjadi provinsi kaya di Korea Selatan. Selain itu, provinsi ini menjadi pusat gerakan

² *Ibid.*

Saemaul Undong di seluruh dunia. *Saemaul Undong* merupakan sebuah gerakan pembaharuan pedesaan dengan berdirinya Akademi Saemaul Undong disana. Tidak hanya itu, Gyengsangbuk-Do juga menjadi tempat pelatihan gerakan ini yang diikuti oleh berbagai delegasi dari belahan dunia. Lalu, *spirit of Saemaul Undong* berhasil merekatkan hubungan Korea Selatan dengan negara-negara di Asia, Asia Tengah, Asia Tenggara, termasuk Indonesia melalui Gyengsangbuk-Do.

Massifnya dinamika partisipasi pemerintah daerah di level internasional mencerminkan adanya perubahan fundamental terkait kedaulatan negara. Adanya sistem Westphalia yang memandang kedaulatan berada di bawah pemerintah pusat harus berbagi peran dan memahami pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan internasionalnya. Dalam hal ini, porsi kedaulatan ditentukan oleh tiap negara masing-masing. Kondisi ini memudahkan pemerintah daerah untuk menjalin hubungan internasional dengan pihak luar. Salah satu wadah yang dapat menjadi akses bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi di level internasional yaitu melalui organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah daerah, asosiasi daerah, dan kota-kota di dunia adalah *United Cities and Local Government – Asia Pacific (UCLG ASPAC)*.

UCLG ASPAC adalah sebuah IGO (*Intergovernmental Organization*) yang terdiri dari pemerintah daerah, asosiasi daerah, dan kota-kota di kawasan Asia Pasifik sebagai anggotanya. UCLG ASPAC dibentuk pada tanggal 14 April 2004 di Taipei. Organisasi ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa organisasi internasional

lainnya, diantaranya adalah bagian regional dari UCLG dunia, *United Towns Organization* (UTO), Asosiasi Dunia dari Metropolis Utama (METROPOLIS), dan penggabungan dari *International Union of Local Authorities*³. Induk organisasi ini yakni UCLG merupakan satu-satunya organisasi pemerintah lokal yang diakui oleh PBB.

UCLG ASPAC telah menjadi fasilitator *taskforce global* bagi pemerintah daerah, mendorong pembentukan satu tujuan khusus menyangkut urbanisasi berkelanjutan. UCLG ASPAC mendukung aktor-aktor pada level sub-nasional menjalankan seluruh tujuan dan target dengan mempertimbangkan keaneragaman peluang, tantangan, dan konteks yang ada. UCLG ASPAC juga menjadi platform global dalam menyuarakan potensi daerah guna mendukung agenda pembangunan. UCLG ASPAC juga mengajak pemerintah daerah untuk menjalankan perannya melalui pencapaian agenda yang ambisius, universal, dan terpadu. Di Indonesia, beberapa kota yang tergabung dalam UCLG ASPAC meliputi Kota Banda Aceh, Kota Bengkulu, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Batam, Kota Jakarta, Kota Jambi, Kota Probolinggo, Kota Salatiga, Kota Singkawang, Kota Surakarta, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Surabaya.

Kali ini, peneliti memilih Kota Surabaya sebagai lokasi untuk menganalisis peranan UCLG ASPAC dalam mewujudkan kota berkelanjutan dalam SDGs 2030. Alasannya karena Kota Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya juga dikenal sebagai kota terbesar ke dua di Indonesia setelah Kota Jakarta. Selain itu, Kota Surabaya dijuluki sebagai salah satu kota industri. Hal tersebut

³ UCLC ASPAC. *Organisasi Kami*. Diakses dari <<https://uclg-aspac.org/id/tentang-kami/organisasi-kami/>> pada tanggal 10 Februari 2020.

dikarenakan Surabaya sebagai pusat kota perekonomian yang berkembang, sekaligus juga sebagai kota metropolitan ke dua di Indonesia.

Signifikansi keberadaan UCLG ASPAC juga dapat terlihat dari upaya yang dilakukannya dengan Kota Surabaya, salah satunya di bidang pembangunan ruang publik. Luas Kota Surabaya sekitar 74,36 km² dan berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya pada tahun 2017 melaporkan bahwa jumlah penduduk Kota Surabaya mencapai 2, 87 juta jiwa⁴. Dengan jumlah tersebut menjadikan Kota Surabaya sebagai kota terpadat se-Jawa Timur. Menurut undang-undang penataan ruang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan menjelaskan bahwa pemerintah harus menyediakan ruang publik yang terbuka dan hijau sebesar 20% dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau yang dimaksud ialah ruang terbuka yang ditanami tanaman. Sebelum era Walikota Tri Rismaharini penataan ruang terbuka hijau di Surabaya masih minim. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya TPS dan SPBU yang tidak dimanfaatkan dan belum adanya taman-taman seperti Taman Harmoni dan Taman Bungkul.

Dalam kaitannya dengan UCLG ASPAC, Kota Surabaya dipilih menjadi model percontohan di Indonesia. Hal ini dapat terjadi mengingat prioritas Kota Surabaya dalam mendorong mewujudkan kota yang berkelanjutan. UCLG ASPAC sendiri juga telah membangun tiga ruang publik di Surabaya⁵. Selain itu, Sekjen UCLG ASPAC, Dr.

⁴ BPS Kota Surabaya. *Statistik Daerah Kota Surabaya 2018*. Diakses dari <<http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/po-content/po-upload/pdrb-2010-2016/Statistik-Daerah-Kota-Surabaya-2018-r.pdf>> pada tanggal 10 Februari 2020.

⁵ Surya.co.id. *UCLG ASPAC Umumkan Pembangunan 3 Ruang Publik di Surabaya*. Diakses dari <<https://surabaya.tribunnews.com/2016/07/23/uclg-aspac-umumkan-pembangunan-3-ruang-publik-di-surabaya>> pada tanggal 10 Februari 2020.

Bernadia Irawati Tjandradewi menyatakan dalam kunjungannya di Taman Harmoni, Keputih Surabaya, pada hari senin (17/6) bahwa Kota Surabaya memang telah menjadi inspirasi bagi kota-kota besar di dunia. Hingga saat ini, Dr. Bernadia sudah banyak sekali mendengar tentang Kota Surabaya. Maka dari itu, peneliti melihat Kota Surabaya sebagai tempat yang ideal untuk mengetahui peranan UCLG ASPAC dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Surabaya telah tergabung dalam UCLG ASPAC sejak November 2006 dengan dikirimkannya UCLG *membership approval* kepada Walikota Surabaya saat itu yaitu Drs. Bambang Dwi Hartono⁶. Selain menjadi anggota UCLG ASPAC, Kota Surabaya turut serta menjadi anggota dalam *CITYNET*, dan *Asia Urban Information Center of Kobe (AUICK)*. Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya dengan UCLG ASPAC dilaksanakan karena memiliki sebuah alasan yang kuat yaitu kesamaan tujuan yakni mewujudkan kota berkelanjutan.

Dengan adanya kesamaan tujuan yang ingin dicapai Pemerintah kota Surabaya dan UCLG ASPAC menjadikan setiap pelaksanaan kerja sama berjalan dengan baik. UCLG ASPAC tentunya turut berperan dalam upaya Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan kota berkelanjutan dalam SDGs. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji apa saja peranan UCLG ASPAC dalam mewujudkan kota berkelanjutan di Surabaya Tahun (2016-2018).

⁶ Data Resmi Pemerintah Kota Surabaya Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana peran UCLG ASPAC dalam mewujudkan kota berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 di Surabaya tahun 2016-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum ialah untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hubungan internasional bagi khalayak umum hingga akademisi melalui sebuah karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Lalu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memenuhi syarat gelar strata 1 program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan khusus penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk peranan *United Cities and Local Government – Asia Pacific* (UCLG ASPAC) dalam mewujudkan kota berkelanjutan di Kota Surabaya. Hal tersebut sesuai dengan Tujuan 11 SDGs 2030 milik PBB. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang terjadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Umum

Manfaat secara umum dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya hubungan internasional. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan isu-isu yang ditangani oleh organisasi internasional.

1.4.2 Secara Khusus

Manfaat khusus dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran *United Cities and Local Government – Asia Pacific (UCLG ASPAC)* dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut pada level *sub-state* terlepas dari banyaknya permasalahan urbanisasi. Secara praktik penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dari hubungan internasional, khususnya dalam kajian kota berkelanjutan dan peran organisasi internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Landasan Teori

1.5.1.1 Peran Organisasi Internasional

Dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk menjalankan fungsinya. Dengan begitu, maka organisasi internasional tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dalam hal ini, peran dari organisasi internasional dianggap sebagai fungsi baru untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemasyarakatan. Charles Pentland menjelaskan peran dari suatu organisasi internasional, yaitu sebagai instrumen dan kebijakan luar negeri dari negara-negara anggotanya, berperan dalam mengatur tingkah laku dan tindakan negara-negara anggota, serta berperan sebagai aktor atau lembaga yang mandiri berdasarkan keputusannya⁷.

Clive Archer juga menjelaskan terdapat tiga peran dari organisasi internasional. Peran pertama ialah sebagai instrumen yang digunakan oleh para anggotanya untuk mewujudkan tujuan tertentu misalnya mendukung kepentingan nasional suatu negara. Hal tersebut biasanya terjadi pada *Intergovernmental organization (IGO)* atau organisasi antarpemerintah yang merupakan organisasi dimana para anggotanya adalah negara-negara yang berdaulat. Gambaran dari organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya berarti implikasi dari setiap keputusan dalam organisasi internasional tersebut berada diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas yang telah disetujui dalam bentuk instrumental yang mengatur aktivitas multilateral anggotanya dalam

⁷ Richard Little & Michael Smith (eds). *Perspectives on World Politics* (London: Routledge, 2006)

lingkup tertentu. Keberadaan organisasi dianggap penting bagi kepentingan kebijakan nasional⁸. Selain itu, organisasi internasional sebagai instrumen dalam mewujudkan agendanya memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau para anggotanya. Organisasi internasional akan membantu para anggotanya dalam mewujudkan tujuan organisasi. Beberapa langkah yang diberikan seperti sarana edukasi *capacity building, financial assistance*, hingga *technical support*⁹.

Peran kedua dari organisasi internasional adalah sebagai arena atau kelompok yang menjalankan aksi-aksi. Organisasi internasional berperan sebagai penyedia tempat-tempat pertemuan bagi anggotanya untuk berkumpul bersama dan berdiskusi serta bekerja sama. Dalam hal ini, organisasi internasional menjadi arena bersaing masing-masing kelompok dalam menyampaikan pandangan mereka¹⁰.

Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen. Maksud dari independen ialah organisasi internasional dapat bertindak tanpa pengaruh dari pihak manapun. Selain itu, organisasi internasional juga dapat memberikan berbagai masukan secara netral tanpa ada campur tangan kepentingan dari pihak luar¹¹.

⁸ Cilve Archer, *International Organization*. Hal. 130-131. (New York: Routledge, 1983).

⁹ Uyo Salifu, *The United Nations' triadic role as International Organisation in the achievement of selected child-related Millenium Development Goals: The case of West Africa* [daring]. Diakses dari < <https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/30352/dissertation.pdf;jsessionid=1D681D190EFE6FB053165B508EDAA9C2?sequence=1> > pada tanggal 6 Mei 2020.

¹⁰ Archer, *Op. Cit.* Hal. 136.

¹¹ Archer, *Op. Cit.* Hal. 137.

Jadi, dari penjabaran peran pertama organisasi internasional yaitu sebagai instrumen yang digunakan oleh para anggotanya untuk mewujudkan sebuah tujuan tertentu. Hal tersebut merupakan gambaran yang tepat untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam menerapkan kebijakan konsep *capacity building*, *financial assistance*, dan *technical support*¹².

Capacity building atau pengembangan kapasitas merupakan sarana edukasi dengan menciptakan suatu pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru yang dikembangkan dari apa yang mereka telah miliki. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang menarik seperti program pelatihan yang terpadu, tepat, dan sistematis¹³. Selain itu, Grindle menjelaskan bahwa dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia maka akan berdampak pada upaya tercapainya tujuan dari sebuah organisasi¹⁴. Dalam hal ini, membangun kapasitas tidak hanya memberikan pelatihan tetapi juga upaya pengembangan sumber daya manusia, proses melengkapi individu dengan pemahaman, keterampilan, pengetahuan, dan akses informasi, sehingga memungkinkan mereka bekerja secara efektif. Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia yang unggul akan mempengaruhi pengembangan organisasi hingga tercapainya tujuan.

¹² Salifu, *Loc. Cit.*

¹³ Kemenkumham, *Galeri Kegiatan dan Kehumasan Ditjen. Peraturan Perundang-undangan* [daring]. Diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/galeri-foto-kegiatan-djpp/706-kegiatan-capacity-building-direktorat-jenderal-peraturan-undangan-tanggal-31-juli.html> > pada tanggal 6 Mei 2020.

¹⁴ Merilee S. Grindle. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries* (Cambridge: Harvard Kennedy School, 1997).

Katty Sessions menjelaskan bahwa *capacity building* dilakukan untuk membantu pemerintah, masyarakat, dan individu untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka¹⁵. Selain itu, *capacity building* juga seringkali digunakan atau didesain untuk memperkuat kemampuan pesertanya dalam mengevaluasi berbagai pilihan kebijakan mereka. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menjalankan keputusan-keputusan yang telah dibuat dengan baik dan efektif.

Dalam peran organisasi internasional sebagai instrumen biasanya menyelenggarakan *training* dan *workshop* secara berkala sesuai dengan tujuan dan isu yang menjadi fokus organisasi internasional tersebut. Para anggota dapat secara aktif mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan. Jadi, program pengembangan kapasitas seperti *training* dan *workshop* menjadi sangat membantu meningkatkan kemampuan mereka dengan begitu dapat menjalankan pilihan kebijakan dengan efektif.

Financial assistance atau bantuan finansial menurut *Japan International Cooperation Agency* (JICA) diberikan oleh berbagai organisasi dan kelompok, termasuk pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan swasta. Pihak-pihak tersebut melakukan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang untuk pembangunan sosial ekonomi¹⁶. Jadi, *financial assistance* dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional baik itu IGO atau INGO dan perusahaan swasta

¹⁵ Katty Sessions, *Building the Capacity for Change: the world stands illprepared to address problem that cut across sectors and boundaries* dalam *EPA Journal* 19 (1993).

¹⁶ JICA, *Types of Assistance* [daring]. Diakses dari < https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/index.html > pada tanggal 9 Mei 2020.

dengan memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang dalam rangka tujuan tertentu. Sifat dari *financial* tidak secara terus menerus diberikan.

Tujuan diberikannya *financial assistance* ialah guna menunjang dan mendorong penyelenggaraan urusan tertentu. *Financial assistance* diberikan dalam bentuk beragam seperti hibah, pinjaman, pengurangan pajak hingga subsidi. Selain itu, bantuan pendanaan merupakan kerja sama teknis antar negara yang biasanya berasal dari pihak ketiga, yaitu berupa bantuan dari lembaga donor internasional atau organisasi internasional¹⁷.

Dalam kasus negara, bantuan finansial tersebut akan membantu negara untuk melakukan pembangunan di bidang tertentu, meringankan dana proyek negara, atau membantu suatu negara untuk keluar dari krisis ekonomi. Disisi lain, negara penerima juga harus menjalankan prinsip hidup hemat karena jika tidak maka *financial assistance* tidak akan berpengaruh signifikan.

Technical support menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) merupakan sebuah bantuan non-keuangan yang diberikan oleh spesialis lokal maupun internasional¹⁸. Bentuk *technical support* sangat beragam, seperti berbagi informasi, keahlian, pelatihan keterampilan, instruksi, transmisi pengetahuan kerja, transfer data teknis, hingga menyediakan layanan konsultasi. *Technical support*

¹⁷ Kemenkeu, *Kajian Tentang Efektivitas Tenaga Ahli Asing Dalam Mendukung Kinerja Di Kementerian Keuangan* [daring]. Diakses dari < https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian_efektivitas_tenaga_ahli%20asing.pdf > pada tanggal 9 Mai 2020.

¹⁸ UNESCO. *Technical Assistance in Cultural Governance* [daring]. Diakses dari <<http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/programmes/technical-assistance/what-is-technical-assistance/>> pada tanggal 14 Maret 2020.

atau bantuan teknis merupakan jenis bantuan yang diberikan secara nyata dan langsung. Jadi, intinya *technical support* merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bantuan barang atau peralatan yang dibutuhkan pada kondisi tertentu.

Ketiga konsep tersebut saling berhubungan. Adanya *capacity building* berperan sebagai *mastermind* agar bantuan yang diberikan organisasi internasional tepat guna dan tidak salah sasaran dari yang sudah direncanakan. Lalu, *technical support* bertugas untuk mengimplementasikan hal tersebut di lapangan guna menyelesaikan proyek bantuan secara langsung. Dalam hal ini, tentunya membutuhkan dana, maka disitulah *financial assistance* dibutuhkan.

Peran organisasi internasional juga dapat dipahami dengan mengetahui tujuan pembentukan dari organisasi tersebut. Pada umumnya, tujuan pembentukan sebuah organisasi internasional didasari pada suatu isu yang ada. Jadi, peran organisasi internasional akan berkaitan dengan isu tersebut¹⁹. Dalam hal ini, peran organisasi internasional berdasarkan isu demokrasi. Dalam menjalankan peran organisasi akan berhubungan dengan upaya mempromosikan, menyebarkan, dan memperkuat demokrasi di suatu negara.

¹⁹ Thomas Kwasi Tiek. *Multilateralization of Democracy Promotion and Defence in Africa*, *Africa Today*, Vol. 56, No. 2 (2009).

1.5.1.2 *Sustainable City*

Sustainable city atau kota berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang relatif baru yang semakin mendapat perhatian beberapa dekade terakhir, baik dari organisasi internasional maupun pemerintah daerah. Kota berkelanjutan juga merupakan konsep yang tercipta dari keyakinan bahwa kehidupan manusia harus berlanjut di dunia. Hal ini berarti tidak ada manusia yang ingin menjadi generasi terakhir dan kemudian hilang, musnah, dan punah. Maka dari itu, kehidupan harus selalu diupayakan menjadi lebih baik dan berkualitas sesuai dengan standar yang diyakini.

World Resources Institute dalam terbitan berkalanya tahun 1997 membahas mengenai sumber daya dunia. Dalam terbitan tersebut menjelaskan bahwa definisi kota berkelanjutan adalah kota yang mampu mencukupi dan memenuhi segala bentuk kebutuhan kaum miskin di kota. Jadi, kemampuan untuk menanggulangi dan memberantas kemiskinan adalah kunci dari kota berkelanjutan²⁰. Seregaldin juga menyatakan bahwa kota yang berkelanjutan adalah kota yang berhasil menjalankan fungsinya terhadap rakyatnya dalam melindungi kesehatan, menyediakan perlindungan, dan menyediakan kesempatan untuk bekerja serta bebas untuk mengekspresikan budaya mereka²¹.

²⁰ Tjuk Kuswartojo. *Asas Kota Berkelanjutan & Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 7, No. 1 (2006).

²¹ *Ibid.*

Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan merupakan Tujuan ke-11 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Tujuan ini dimaksudkan untuk menempatkan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah massifnya urbanisasi. Selain itu, juga bercita-cita menciptakan kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

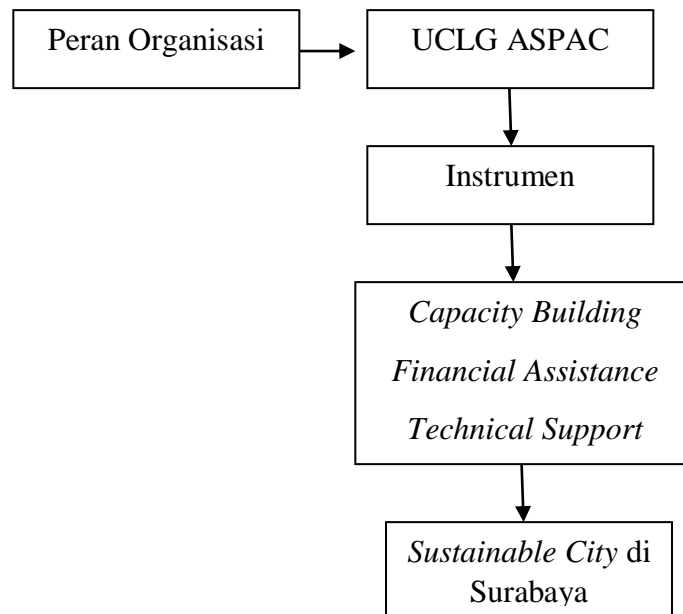
Alasan mengapa Tujuan 11 penting bagi pemerintah daerah adalah karena dengan adanya Tujuan 11 akan mengajak pemerintah daerah secara langsung untuk memenuhi perannya dalam mewujudkan Agenda SDGs Pasca-2015. Terdapat beberapa target yang ingin dicapai pada tahun 2030 dari Tujuan 11 berkaitan dengan pemerintah daerah, yaitu: (1) Jaminan akses perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat dan peningkatan kondisi pemukiman kumuh; (2) Penyediaan akses transportasi yang mudah, aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua masyarakat serta peningkatan keselamatan lalu lintas melalui penambahan jumlah transportasi umum yang ramah kepada anak-anak, perempuan, orang disabilitas, dan manula; (3) Peningkatan urbanisasi inklusif yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan; (4) Menjaga dan melindungi warisan alam dan budaya; (5) Pengurangan angka kematian, korban, dan kerugian ekonomi relatif akibat dari bencana serta melindungi masyarakat dari segala bentuk situasi rentan; (6) Pengurangan dampak lingkungan perkapita di perkotaan dan memperhatikan secara khusus kualitas udara dan

pengelolaan limbah; (7) Menyediakan akses universal terhadap ruang terbuka hijau dan publik yang inklusif, aman, dan aksesibel.

Terlebih lagi, pesatnya urbanisasi yang hadapi oleh kota-kota di seluruh dunia menyebabkan pemerintah daerah dihadapkan oleh banyak permasalahan. Permasalahan tersebut mulai dari pemukiman kumuh, *urban sprawl*, segregasi, dan pengurangan emisi karbon di perkotaan. Maka dari itu, pentingnya komitmen dalam mewujudkan kota berkelanjutan guna kesejahteraan rakyat.

1.5.1.3 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Elaborasi Penulis

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa UCLG ASPAC sebagai organisasi internasional yang memiliki komitmen dalam mewujudkan SDGs 2030 bekerja sama dan membantu kota-kota anggotanya agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan diperkotaan dan menjadi kota yang berkelanjutan. Dalam hal ini UCLG ASPAC berperan sebagai instrumen dengan bekerja sama dan membantu Kota Surabaya. Peran UCLG ASPAC sebagai instrumen dibagi menjadi tiga aspek, yaitu *capacity building*, *financial assistance*, dan *technical support*. Ketiga aspek tersebut dilakukan dalam upayanya mewujudkan kota berkelanjutan di Kota Surabaya.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peran UCLG ASPAC dalam mewujudkan kota berkelanjutan Tujuan 11 dalam SDGs di Surabaya pada tahun 2016 hingga 2018 ialah sebagai instrumen yaitu dengan memberikan *capacity building*, *financial assistance*, dan *technical support*. Dalam hal *capacity building*, UCLG ASPAC menyelenggarakan *training* dan *workshop*. Lalu, IGO ini memberikan *financial assistance* berupa hibah uang kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk bantuan proyek pembangunan ruang publik di Surabaya dan *technical support* dalam proyek yang sama. *Technical support* tersebut diberikan dalam penyusunan desain dengan menggunakan aplikasi software Minecraft.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk mengkaji suatu fakta, kemudian memberikan penjelasan terkait realita yang penulis temukan yang dibawakan dalam bentuk naratif. Penelitian deskriptif menurut Notoatmodjo adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan tentang suatu kondisi tertentu secara objektif. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian deskriptif ialah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan data, analisis data, membuat kesimpulan, dan laporan. Jenis penelitian ini juga berusaha untuk memperoleh dan menjelaskan fakta-

fakta secara jelas, teliti, dan lengkap. Sejalan dengan penjelasan dari Prof. Dr. Sugiyono yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif menyajikan data secara terperinci tentang suatu fenomena tertentu.

Lalu, Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan suatu penelitian yang dipakai untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, pemikiran individu atau kelompok. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara menyeluruh²². Jadi, dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai upaya yang dilakukan oleh UCLG ASPAC sebagai organisasi internasional yang berkomitmen mewujudkan kota berkelanjutan di Kota Surabaya sesuai SDGs 2030 milik PBB.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak terlalu jauh dan luas dalam pembahasan, maka penulis memberikan batasan waktu. Jangkauan pada penelitian ini mengambil rentang waktu dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Alasannya karena berkaitan dengan agenda global dari PBB mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2015 maka dari itu penulis membatasi penelitian ini mulai dari tahun pasca-2015 yaitu 2016. Sedangkan tahun 2018 dipilih sebagai tahun dimana Walikota Surabaya Tri Rismaharini terpilih menjadi Presiden UCLG ASPAC untuk periode 2018-

²² Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

2020. Hal tersebut menunjukkan pengakuan Kota Surabaya sebagai kota berkelanjutan di mata dunia.

Selain batasan waktu, penulis juga memberikan batasan lingkup penelitian yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Lingkup penelitian adalah pada upaya-upaya yang dilakukan UCLG ASPAC dalam membantu Kota Surabaya menjadi kota berkelanjutan sesuai dengan Tujuan 11 dalam SDGs, sehingga akan mendapatkan pemahaman mengenai peranan UCLG ASPAC.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis sampaikan, penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Dalam metode ini banyak menggunakan metode studi kasus, observasi, dan wawancara mendalam. Burhan Bungin menjelaskan bahwa dalam penelitian sosial dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, analisis *life history*, survei, dan lainnya²³.

Bagong Suyanto & Sutinah menjabarkan bahwa terdapat tiga macam teknik pengumpulan data secara kualitatif²⁴. Yang pertama adalah wawancara mendalam dan terbuka. Jadi, data yang diperoleh berasal dari kutipan langsung dari narasumber tentang pendapat, perasaan, pengalaman, dan pengetahuannya terkait isu yang diangkat. Yang

²³ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).

²⁴ Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

kedua adalah observasi langsung. Dalam hal ini, data diperoleh melalui observasi langsung yang terdiri dari penjabaran rinci terkait perilaku, kegiatan, tindakan orang-orang, keseluruhan peluang terjadinya interaksi interpersonal, dan proses penataan yang menjadi bagian dari pengalaman manusia yang menjadi obyek penelitian. Yang terakhir yaitu penelaahan terhadap dokumen tertulis. Data-data yang didapat dari metode ini berasal dari kutipan, cuplikan, dan penggalan-penggalan dari laporan dan catatan organisasi, klinis, atau program tertentu. Selain itu, data juga diperoleh dari memorandum-memorandum, korespondensi, terbitan laporan resmi pemerintah, buku harian pribadi, jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survei.

Sumber data yang diperoleh dimaksudkan agar penulis dapat membuktikan secara nyata yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapat dengan pengamatan penulis secara langsung atau disebut dengan *first-hand information*. Hal tersebut berarti penulis berinteraksi secara langsung dengan objek kajian. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya bidang Administrasi Kerja Sama yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat melalui hasil pengamatan dari pihak lain. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan artikel-artikel dan dokumen laporan resmi UCLG ASPAC yang ada di internet dan merangkumnya menjadi satu untuk dijadikan data yang dapat dilaporkan. Data dalam

penelitian ini penulis peroleh melalui studi pustaka (*library research*). Artinya penulis mengumpulkan berbagai materi yang relevan dengan judul penelitian sebagai sumber. Materi yang dimaksud berupa buku-buku, dokumen-dokumen, dan situs internet

1.7.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data dibagi menjadi dua yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif menggunakan statistik sebagai alat analisis datanya. Dalam menganalisis data kuantitatif, maka dalam pengolahan data merupakan kegiatan awal yang terdiri dari beberapa tahap²⁵. Tahapan tersebut meliputi *editing*, *coding* atau pembuatan kode, penyederhanaan data, dan mengode data.

Lalu, metode analisis kualitatif digunakan apabila data empiris yang dipakai adalah data kualitatif yang berupa kata-kata dan tidak bisa dikategorikan. Prof. Dr. Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dari awal penelitian yaitu sebelum masuk ke lapangan hingga selesai di lapangan²⁶. Jadi, analisis data kualitatif akan melakukan pengorganisasian data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit-unit, membuat sintesa, dipilih dan disusun mana saja data penting yang akan dipelajari dan dianalisis dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Miles & Huberman bahwa teknik analisis data terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*. Jadi, data yang terkumpul akan direduksi kemudian disajikan serta disimpulkan atau diverifikasi.

²⁵ *Ibid.* Hal. 93.

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah data-data diperoleh, data tersebut akan dianalisis. Selanjutnya, data juga akan dipilih, dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab dan membuktikan argumen utama.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka pemikiran atau landasan pemikiran yang berkaitan dengan landasan teori dan sintesa pemikiran, serta dilengkapi dengan argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II : Penjelasan peran UCLG ASPAC sebagai instrumen dalam bentuk *capacity building* guna menunjang pencapaian SDGs Tujuan ke-11 kota berkelanjutan di Surabaya.
3. Bab III: Penjelasan peran UCLG ASPAC sebagai instrumen dalam bentuk *financial assistance* dan *technical support* dalam proyek pengembangan ruang publik di Kota Surabaya guna menunjang pencapaian SDGs Tujuan ke-11.
4. Bab IV: Penutup berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan analisis peran UCLG ASPAC berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN